
PILIHAN STRATEGI SANKSI EKONOMI CHINA DALAM MERESPON KEBIJAKAN PENEMPATAN SISTEM THAAD DI KOREA SELATAN TAHUN 2016 – 2018

Nurul Atiyah Safira¹

International Relations Department

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bantul, DIY, 55183

nurulatiahsafira@yahoo.com

Submitted:

Accepted:

Abstract

This thesis discusses China's response to South Korea for its policy to use the High Altitude Area Defense (THAAD) Terminal in its country which raises diplomatic opposition from China. On this issue, THAAD is considered by China to have the potential to threaten China's security, which is one of China's main national interests. So that China decided to punish South Korea with Economic Sanctions. Economic sanctions themselves are a Chinese strategy to encourage South Korea to cancel its decision to use THAAD. This scientific work aims to explain why China chose Chinese economic sanctions as its strategy in achieving its objectives related to South Korea's THAAD policy. Then proving economic sanctions as the right choice for maximizing the interests of China

Keywords: Economic Sanction, China, THAAD, South Korea.

Abstrak

Skripsi ini membahas respon Tiongkok terhadap Korea Selatan atas Kebijakannya untuk menggunakan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dalam negaranya yang menimbulkan oposisi diplomatik dari Tiongkok. Dalam isu ini THAAD dianggap Tiongkok berpotensi untuk mengancam keamanan Tiongkok, yang mana keamanan merupakan salah satu kepentingan nasional utama Tiongkok. Sehingga Tiongkok memutuskan untuk membalas Korea Selatan dengan Sanksi Ekonomi. Sanksi Ekonomi sendiri merupakan strategi Tiongkok untuk mendorong Korea Selatan agar membatalkan keputusannya untuk menggunakan THAAD tersebut. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa Tiongkok memilih sanksi ekonomi Tiongkok sebagai strateginya dalam mencapai tujuannya terkait kebijakan THAAD Korea Selatan. Kemudian membuktikan sanksi ekonomi sebagai pilihan yang tepat demi memenuhi kepentingan Negara Tiongkok secara maksimal.

Kata Kunci: Sanksi Ekonomi, Tiongkok, THAAD, Korea Selatan

INTRODUCTION

Sebagai Negara yang berperan aktif dalam dunia internasional serta dilengkapi dengan perekonomian yang besar dan keabilitas militer yang terus berkembang. Tiongkok memiliki posisi sebagai Negara yang mampu menggunakan kekuatannya tersebut sebagai senjata untuk melindungi kepentingannya dan tidak bisa diremehkan apabila Tiongkok sudah mengambil tindakan demi kepentingan Negaranya. Tiongkok merupakan Negara yang menjunjung tinggi perdamaian, dalam Negara maupun dalam lingkungan Internasional. Sehingga Tiongkok cenderung menghindari tindakan yang menciptakan konfrontasi ataupun kekerasan, akan tetapi Tiongkok akan mengambil tindakan yang sesuai apabila terjadi konflik dengan Negara lain yang dapat merusak perdamaian bagi Negaranya. Seperti yang dirasakan Tiongkok pada tahun 2016, yang mana terjadi perselisihan antara Tiongkok dengan Negara tetangganya yaitu Korea Selatan yang menyebabkan adanya persetujuan hubungan diplomatik.

Persetujuan tersebut berawal dari masalah nuklir Korea Utara. Pengembangan senjata nuklir dan kemampuan rudal balistik Korea Utara yang mengancam keamanan Korea Selatan, menyebabkan Seoul untuk mengejar kebijakan keamanan yang lebih agresif. Diawali dari keputusan Seoul untuk meningkatkan kerjasama militernya dengan Jepang dan sekutu lain Amerika Serikat atau disingkat sebagai AS. Tiongkok, terkait kasus nuklir Korea Utara sama seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, memiliki kepentingan yang sama yaitu denuklirisasi Korea Utara. Namun, Tiongkok yang diketahui menganggap AS sebagai saingannya dalam global power tampak kurang peduli dengan tujuan tersebut dan lebih fokus terhadap mencegah Korea Selatan menjalin hubungan aliansi yang lebih dalam terhadap AS dan sekutunya yang dikhawatirkan Tiongkok dapat mengguncang stabilitas regional. Sebaliknya, Seoul telah memberikan prioritas utama untuk denuklirisasi Korea Utara dan memperkuat hubungannya dengan sekutunya pada saat bahaya besar. Amerika Serikat yang juga memandang nuklir Korea Utara sebagai ancaman, mengambil kesempatan ini untuk mengajak Korea Selatan menjalin persekutuan dengan meningkatkan kerja sama Militer, dalam hal ini dengan keputusan untuk menggunakan sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense, yang dikenal sebagai THAAD milik Amerika Serikat untuk mempertahankan diri dari ancaman nuklir Korea Utara (McGuire, 2018).

Pada tanggal 7 Februari 2016, para pejabat militer Korea Selatan dan Amerika mengumumkan bahwa pemerintah kedua Negara telah memulai pembicaraan mengenai kemungkinan penempatan sistem pertahanan rudal THAAD di Korea Selatan, sistem yang dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik atau Nuklir (Liang Fook, 2017). Pada awalnya Korea Selatan menolak sistem tersebut karena kontroversi yang mengakibatkan banyaknya oposisi, namun setelah berbulan-bulan di bicarakan dan melihat peningkatan ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh pengembangan rudal Korea Utara hal tersebut mengubah pandangan pemerintah Korea Selatan terhadap THAAD. Akhirnya 7 Juli 2016, Departemen Pertahanan AS dan Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan mengumumkan dalam pernyataan bersama yaitu keputusan aliansi setuju untuk menempatkan sistem THAAD di Korea Selatan (Ethan Meick, 2017, p. 4). Kebijakan Korea Selatan untuk menggunakan THAAD di setuju demi mempertahankan kekuatan militer dan memperkuat pertahanan negaranya melawan Korea Utara.

Akan tetapi, Tiongkok tidak menyambut baik kebijakan penggunaan THAAD oleh Korea Selatan tersebut. Hal tersebut tercermin dari penyampaian Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, setelah Korea Selatan resmi mengumumkan keputusannya tersebut. Wang Yi mengatakan, "Cakupan sistem pertahanan rudal THAAD di Korea Selatan, terutama ruang lingkup pemantauan radarnya, jauh melampaui kebutuhan pertahanan Korea Selatan dan malah akan mencapai jauh ke pedalaman Asia, yang akan langsung merusak kepentingan keamanan strategis Tiongkok." (Ethan Meick, 2017, p. 4). Duta Besar Tiongkok Qiu Guohong juga telah memperingatkan bahwa penggunaan THAAD dapat "menghancurkan" hubungan Tiongkok-Korea Selatan dalam sekejap, namun respon dari Korea Selatan yang diwakili oleh juru bicara presiden Korea Selatan, Jung Youn-ku keluar sebagai peringatan terhadap Tiongkok bahwa menyebarkan THAAD adalah "masalah yang akan kami putus sesuai dengan keamanan dan kepentingan nasional sendiri." (Tiezzi, China Warns THAAD Deployment Could Destroy South Korea Ties 'in an Instant'. The Diplomat, 2016). Respon tersebut menambah pandangan negatif pemerintah Tiongkok terhadap kebijakan THAAD. Tekanan diplomatik semakin memanas setelah AS-Korea Selatan bersatu mengumumkan secara resmi akan memulai operasi pemasangan sistem THAAD di Korea Utara pada 8 Juli 2016. Presiden Tiongkok, Xi Jinping juga mengangkat keberatannya akan penggunaan sistem THAAD dengan rekannya dari Korea Selatan di sela-sela KTT G20 di Hangzhou pada bulan September 2016 (Liang Fook, 2017).

Tiongkok memiliki beberapa alasan yang mendasari diambilnya sikap kontra terhadap kebijakan penggunaan sistem THAAD ini. Tiongkok, melihat THAAD sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negaranya. Tiongkok juga mengklaim bahwa THAAD akan merusak kemampuan pencegah nuklir Negara Tiongkok itu sendiri. Tiongkok yang juga sejak awal merespon negatif terhadap hubungan aliansi antara Korea Selatan dengan AS, Khawatir adanya THAAD sebagai sistem yang dikembangkan oleh Amerika Serikat bukan hanya sekedar langkah defensif AS untuk mempertahankan diri dari ancaman Korea Utara namun juga sebagai niat untuk mengancam kepentingan keamanan Tiongkok, Tiongkok terus menyatakan ketidakpuasannya atas keputusan Korea Selatan karena kekhawatirannya THAAD akan mengancam keamanan nasional negara bahwa penggunaan THAAD mungkin menjadi rencana oleh AS untuk membidik Tiongkok. Pemerintahan Beijing, juga mengklaim bahwa radar sistem dapat digunakan oleh Amerika Serikat untuk memata-matai Tiongkok (Volodzko, 2017). Dimana sistem radar THAAD dapat mengumpulkan data-data dikisaran jarak hingga 2.000 km yang dimana mencakup sebagian besar wilayah Tiongkok. (Chris Inton, 2017).

Dalam pernyataannya terkait dengan ancaman – ancaman yang ditimbulkan dengan adanya THAAD, Tiongkok telah melakukan segala bentuk protes, menunjukkan oposisi yang kuat terhadap kebijakan tersebut sejak awal di umumkannya diskusi penggunaan THAAD oleh Korea Selatan dengan Amerika Serikat, namun setelah protes dan oposisi yang di tunjukan tidak memberikan perubahan terhadap keputusan Korea Selatan akan THAAD Tiongkok pun kemudian mengancam, akan memberikan aksi yang sesuai dengan pernyataan mereka bahwa akan mengambil tindakan-tindakan terkait penentangan terhadap THAAD jika Korea Selatan tidak membatalkan kebijakannya dalam menggunakan sistem THAAD tersebut (Habiburrahman, 2017, p. 11). Sebagai Negara yang dilengkapi dengan kekuatan ekonomi dan kemampuan militer lebih, dibuktikan dengan adanya fakta kehadiran Tiongkok sebagai aktor ekonomi terbesar dunia (world's largest economy) juga aktor militer kuat (strong military actor) yang tidak terbantahkan (Roy, 1998). Dengan power yang dimilikinya, Tiongkok dapat menunjukkan kerugian yang akan didapatkan Korea Selatan jika hubungan bilateral kedua Negara tidak dijaga.

Tiongkok merupakan Negara yang sangat membela kepentingan nasionalnya dan tidak takut untuk menghukum mereka yang merugikan kepentingan negaranya (Lee B., 2017). Demikian dalam strateginya memperjuangkan kepentingannya untuk menggagalkan

THAAD, Tiongkok bisa saja menekan pemerintah Korea Selatan dengan kekuatan militer yang dimilikinya. Tiongkok tumbuh menjadi negara yang sangat fokus dalam mengembangkan kekuatannya. Kemajuan dan kemampuan teknis militer Tiongkok sangatlah luar biasa, dapat dilihat dari Kapasitas militer yang dimiliki Tiongkok, berbagai jenis peralatan militer modern baik di bidang armada darat, udara, maupun laut (Marcus, 2018). Tiongkok juga memiliki senjata Nuklir yang perlu diwaspadai, rudal balistik konvensional, jet tempur generasi kelima, pasukan drone jarak jauh yang mematikan. Mengukur kekuatan militer Tiongkok juga dapat tinjau dari alokasi anggaran militer Tiongkok (Peck, 2018). Alokasi anggaran pertahanan yang disediakan Tiongkok tiga kali lebih banyak dari India dan lebih besar dari kombinasi belanja militer Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Vietnam. Dengan kekuatan militer tersebut, Tiongkok terbukti mampu memberikan tekanan militer untuk membalas kebijakan THAAD dan menekan Korea Selatan. Namun ketimbang menggunakan kekuatannya, Tiongkok lebih memilih menetapkan sanksi ekonomi sebagai strateginya terhadap kebijakan THAAD Korea Selatan (Setiawan, 2017).

Sanksi Ekonomi adalah tindakan yang diambil oleh satu Negara sebagai kebijakan luar Negerinya untuk menekan ekonomi Negara lain, seringkali untuk memaksa perubahan politik Negara yang dituju tersebut. Melalui Sanksi Ekonomi Tiongkok mulai menerapkan taktik penekanan terhadap Korea Selatan, diawali pada September 2016, Tiongkok mulai melarang segala jenis entertainment asal Korea Selatan dalam Negara, yang mana membatalkan menampilkan musik Korea, melarang masuknya bintang televisi asal Korea Selatan tanpa adanya penjelasan, terlebih lagi Tiongkok menarik semua bintang televisi negaranya yang sedang beraktivitas di Korea Selatan dan pada Januari 2017, Tiongkok mulai melarang segala jenis penjualan musik pop Korean (Kpop) dalam Negara serta pembatalan penampilan seniman-seniman asal Korea Selatan di Tiongkok yang kemudian digantikan dengan seniman dalam negeri. Kemudian pada bulan yang sama, adanya larangan masuk kosmetik dan barang-barang makanan Korea Selatan. Pada Maret 2017, Tiongkok melarang penjualan semua video game online asal Korea Selatan, pada bulan yang sama juga Tiongkok memberhentikan penjual-belian mobil asal Korea Selatan yaitu Hyundai dan Kia. Setelah itu Tiongkok juga melarang segala aktifitas yang berhubungan dengan Tourism, Tiongkok tidak mengizinkan penerbangan pesawat antara kedua Negara dan pada Juni 2017, Tiongkok menghentikan Agensi Travel untuk mengirim paket tur ke Korea Selatan (Ethan Meick, 2017).

Terlebih lagi Lotte Grup yang merupakan perusahaan asing terbesar milik Korea Selatan di Tiongkok ditutup sementara oleh pemerintah Tiongkok (Hutchinson, 2016, p. 15). Tiongkok mulai mengambil langkah penutupan Perusahaan Lotte pada bulan Februari dan Maret 2017, berdasarkan data perusahaan yang diliput oleh Yonhap News, 90% dari 99 toko penyalur Lotte Mart di Tiongkok berhenti beroperasi, 74 diantaranya ditutup paksa dengan alasan inspeksi, 13 lainnya dikarenakan adanya tekanan dari gerakan anti-korea (Habiburrahman, 2017, p. 11). Melalui tindakan-tindakan dan tekanan sanksi ekonomi tersebut Tiongkok berusaha mempengaruhi Korea Selatan untuk mempertimbangkan keputusannya atas penempatan sistem THAAD.

Dengan melihat pilihan strategi Tiongkok tersebut, tentu Tiongkok memiliki alasan kuat yang mendorongnya untuk memilih sanksi ekonomi sebagai strateginya dalam memperjuangkan kepentingannya ketimbang menggunakan kekuatan militernya, walaupun Tiongkok memiliki kekuatan militer yang kuat. The Introduction describes the context of research or findings which also followed by the scope of writings.

METHODS OF RESEARCH

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai pilihan strategi sanksi ekonomi Tiongkok terhadap Korea Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan data Studi Dokumen dimana pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian melainkan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Data yang dikumpulkan adalah data-data sekunder, yang berasal dari buku, jurnal, artikel – artikel resmi yang bersumber dari internet, surat kabar, dll. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah, Teknik Analisa Kualitatif. Data yang relevan dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif, yakni dengan menghubungkan fenomena-fenomena yang satu dengan lainnya untuk menarik kesimpulan akhir.

THEORETICAL FRAMEWORK

MENGANALISA SANKSI EKONOMI SEBAGAI PILIHAN STRATEGI TIONGKOK
TERHADAP ISU KEBIJAKAN PENEMPATAN SISTEM PERTAHAN RUDAL THAAD KOREA
SELATAN

Tulisan ini menganalisa mengapa Tiongkok memilih sanksi ekonomi sebagai strateginya terhadap kebijakan THAAD Korea Selatan yang ditentanginya dengan menggunakan dua teori yaitu Politik Luar Negeri dan Pilihan Rasional. Dalam hubungan internasional, Foreign policy atau Politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (Decision Maker) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Jack C. Plano, 1999). Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Mark R. Amstutz: “Foreign policy as explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interest beyond a country’s territorial boundaries.”

Berdasarkan definisi di atas politik luar negeri merupakan alat untuk memenuhi kepentingan nasional (Amstutz, 1998). Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan yang terdiri dari pilihan- pilihan yang ada dengan mempertimbangkan konsekuensi – konsekuensinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Graham T Allison: “Governments select the action that will maximize strategic goals and objectives.” Berdasarkan definisi tersebut, pemerintah Negara harus memilih tindakan yang diyakini bisa memenuhi kepentingan nasional secara maksimal (Allison, 1971, p. 32). Kemudian menurut Marijke Breuning dalam bukunya yang berjudul Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction menjelaskan bahwa, politik luar negeri memiliki dua unsur, yakni tujuan dari tindakan yang diambil dan instrumen yang akan digunakan. Berdasarkan gambar diatas, tujuan dan tindakan merefleksikan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh suatu negara. Sedangkan unsur yang kedua adalah penggunaan instrumen dengan mempertimbangkan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki Negaranya untuk mencapai tujuan. (Breuning, 2007).

Berdasarkan penjelasan konsep tersebut bisa di aplikasikan, Tiongkok memandang adanya THAAD di Korea Selatan dapat mengancam kepentingan keamanan negaranya, demikian untuk melindungi diri dari ancaman tersebut, Tiongkok pun mengeluarkan strategi atau tindakan untuk menekan Korea Selatan, yang mana bertujuan untuk mempengaruhi Korea Selatan agar membatalkan kebijakan penanaman sistem THAAD dalam Negaranya. Dalam strateginya ada dua pilihan instrumen yang bisa Tiongkok gunakan untuk mencapai tujuannya, yaitu kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Yang mana dalam bentuk sanksi ekonomi dan aksi militer.

Kemudian dalam teori pilihan rasional, Penjelasan bahwa politik luar negeri suatu negara harus dapat memenuhi kepentingan nasional Negaranya secara maksimal menjadikan

negara atau pemerintah sebagai aktor rasional. Robert Dahl dan Charles Linblom mendefinisikan aktor rasional sebagai:

“Suatu tindakan disebut rasional kalau tindakan itu secara tepat diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, berdasarkan pertimbangan tentang tujuan itu dengan kenyataan tindakan itu dilakukan (Rosenau, 1976).”

Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan dimana masing-masing pilihan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi. Negara sebagai aktor rasional yang mana menomorsatukan survivalitas dan kesejahteraan dalam setiap tindakannya akan memilih tindakan yang paling menguntungkan dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Dalam mencapai hal tersebut, Negara akan melihat pilihan yang dianggap memaksimalkan keuntungan (benefit) dan meminimalkan kerugian (cost) yang diterima (Allison, 1971, p. 33). Untuk menganalisis Benefit dan Cost yang diterima oleh Negara, Penulis menggunakan Teori Pilihan Rasional. Menurut Kegley, teori pilihan rasional merupakan sebuah cara pengambilan keputusan yang didasari oleh pertimbangan mengenai untung-rugi dalam rangka mengarahkan keputusan kepada alternatif kebijakan yang mempunyai potensi terbesar untuk mencapai tujuan tertinggi (Kegley, 2011).

Menurut teori ini aktor akan berusaha untuk membuat keputusan yang dapat memaksimalkan atau setidaknya mencapai kepentingan mereka dengan kemungkinan cost terendah. Teori ini secara esensial memandang setiap keputusan yang diambil oleh suatu aktor (negara) senantiasa berpijak pada pertimbangan Benefit dan Cost, sehingga akan memberikan keuntungan maksimal dalam meraih kepentingan nasionalnya. Pada akhirnya tujuan akhir yang ingin dicapai adalah secara akurat membandingkan kedua nilai tersebut, agar dapat menentukan tindakan yang paling menguntungkan Negara untuk memenuhi kepentingannya secara maksimal.

Berdasarkan dengan penjelasan Teori tersebut dapat diaplikasikan, Tiongkok sebagai Negara dengan kekuatan ekonomi dan kemampuan militer lebih dihadapi dengan pilihan antara menggunakan aksi militer atau sanksi ekonomi sebagai instrumen yang akan digunakan dalam tindakannya untuk menekan Korea Selatan terhadap isu kebijakan THAAD. Melalui Rational Choice, Pemerintah Tiongkok akan melihat pilihan mana yang memberikan lebih banyak keuntungan dan sedikit kerugian yang akan diterima. Terkait isu THAAD ini yang menjadi pertimbangan utama pemerintah Tiongkok adalah keamanan Negeranya, sehingga mereka akan memilih pilihan yang dapat memenuhi kepentingan Keamanan Negeranya namun secara langsung dapat memberi penekanan kuat terhadap Korea Selatan.

Sanksi ekonomi kemudian dipilih oleh pemerintah Tiongkok sebagai instrumen yang lebih menguntungkan untuk digunakan ketimbang aksi militer.

Fakta dari menggunakan kekuatan militer sendiri salah satunya adalah dapat menimbulkan kericuhan yang tidak diinginkan. Militer dapat memicu Korea Selatan untuk membalas Tiongkok secara langsung yang kemudian dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perang senjata antar kedua Negara. Dalam iklim globalisasi, perang akan menciptakan bencana yang lebih besar ketimbang memperbaiki tatanan yang ada dan menimbulkan ketidakstabilan dunia internasional yang mana konflik akan aksi militer mengorbankan jiwa serta memancing kemarahan negara lain karena penderitaan manusia yang disebabkan oleh kekerasan. Tentu Tiongkok tidak ingin hal tersebut terjadi, adu militer juga dapat mengancam keamanan Negara Tiongkok sendiri.

Dibanding dengan Sanksi ekonomi merupakan instrumen politik luar negeri yang digunakan untuk menekan Negara lain agar berkompromi dengan kehendak Negeranya tanpa perlu melibatkan kekuatan militer dan memicu kekerasan yang tidak diinginkan antar Negara. Dengan begitu, dapat dilihat alasan yang kuat mengapa Tiongkok kemudian memilih menggunakan sanksi ekonomi untuk menekan Korea Selatan adalah Tiongkok melihat sanksi ekonomi sebagai pilihan yang paling menguntungkan untuk memenuhi kepentingannya dalam mempengaruhi keputusan Korea Selatan akan kebijakan THAAD.

RESULT AND ANALYSES

SANKSI EKONOMI MENJADI PILIHAN STRATEGI YANG PALING MENGUNTUNGKAN TIONGKOK

Dalam memberikan hasil analisa yang sesuai dengan penjelasan teori yang diberikan, maka struktur dalam tulisan ini pertama membahas peran Politik luar negeri Tiongkok dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya untuk menjaga dan memenuhi kepentingan nasional Tiongkok. Kemudian pemaparan lebih jelas terkait sanksi ekonomi sebagai pilihan strategi Tiongkok, factor-faktor yang membuat pemerintah Tiongkok memilih Sanksi Ekonomi sebagai strateginya hingga keberhasilan strategi tersebut dalam mempengaruhi Korea Selatan demi memenuhi kepentingan Tiongkok, dan Kesimpulan.

Politik luar negeri bagi Tiongkok memiliki peran penting bagi kemakmuran kondisi nasionalnya. Efektif atau tidaknya suatu kebijakan luar negeri yang diformulasikan kepada negara lain atau kancah internasional sangat krusial bagi kemajuan nasionalnya. Oleh karena itu, suatu Negara akan memiliki prinsip dalam politik luar negerinya yang mana prinsip ini

akan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara agar dapat memenuhi kepentingan nasional mereka. Tiongkok secara konsisten menjunjung tinggi perdamaian dan pembangun negaranya. Melalui prinsipnya, politik luar negeri Tiongkok memiliki tujuan dasar untuk mengupayakan lingkungan internasional yang damai dan stabil, lingkungan bertetangga, setara dan iklim yang saling menguntungkan untuk kerja sama, pengakuan obyektif dan positif dari komunitas internasional, dan untuk memfasilitasi program membangun masyarakat Tiongkok yang makmur serta memberikan peluang strategis bagi pembangunan dalam negaranya (Embassy of The People's Republic of Tiongkok In The Republic of Albania, 2008). Kemudian tujuan lain dari politik luar negeri Tiongkok adalah untuk meningkatkan perannya di lingkungan internasional agar Tiongkok dapat diakui sebagai Negara superpower dan memiliki peran penting dalam tatanan global (Muchtar, 2011). Untuk mendukung tujuan tersebut para elit dan pemimpin Tiongkok percaya bahwa ada 4 kepentingan yang harus dijadikan fokus utama dalam tujuan politik luar negeri Tiongkok. 1) Kestabilan Keadaan Domestik, 2) Pertumbuhan Ekonomi, 3) Keamanan Nasional, 4) Kerjasama Regional.

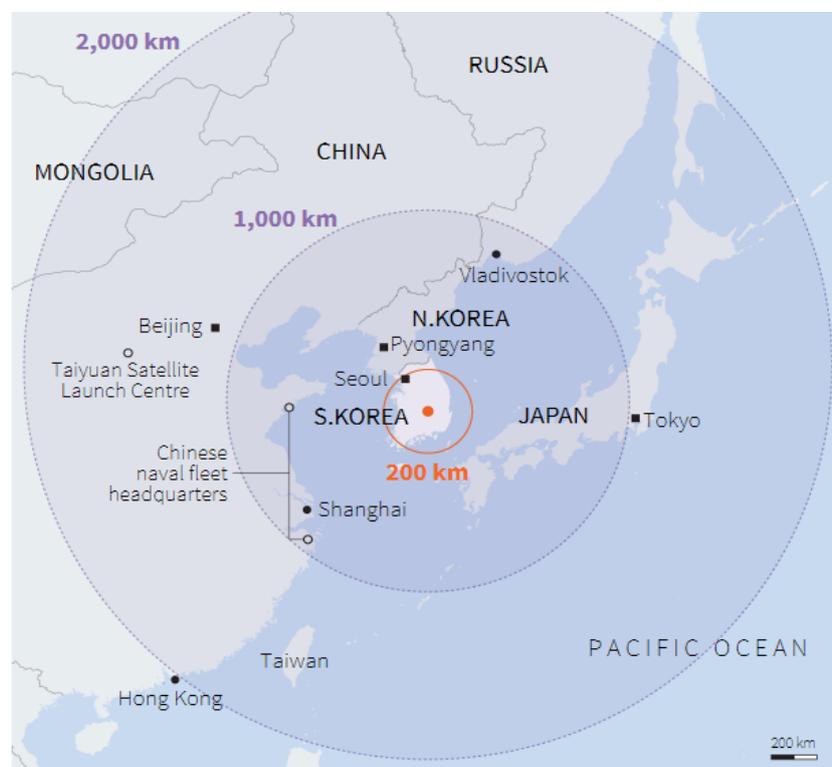
Di wilayah Asia Pasifik, sebagai salah satu Negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada 1990-an yang menjadikannya sebagai kekuatan dominan di Asia timur, Tiongkok memiliki keinginan untuk memainkan peran kepemimpinan. Oleh karena itu, Tiongkok melalui kerjasama regional mencoba menggunakan instrument kekuatan ekonominya untuk memperluas pengaruhnya di Asia. Tiongkok memulai agenda ambisius menggunakan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai Tiongkok, investasi Tiongkok, dan persyaratan perdagangan yang menguntungkan sebagai alat untuk memperluas kekuasaannya, sambil meyakinkan dunia bahwa itu akan menjadi kekuatan regional yang damai yang dapat memberikan negara-negara lain peluang untuk makmur, yang mana Tiongkok akan mengarahkan ekonomi global ke arah yang kondusif bagi kesejahteraan bersama semua Negara (Harrell, 2018, p. 5).

Selain menjadi instrumen yang baik untuk menjalin kerjasama regional, kekuatan ekonomi yang Tiongkok miliki juga digunakan Tiongkok sebagai alat dalam strateginya untuk membalas Negara-negara yang memberikan ancaman terhadap kepentingan Negara Tiongkok. Tiongkok telah menggunakan kebijakan hukuman perdagangan sebagai instrumen paksaan selama ketegangan di masa lalu, dan tentu bisa Tiongkok gunakan dalam sengketa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Misalnya, melalui tarif perdagangan, pembatasan pariwisata, dan batasan investasi langsung asing (Pike, n.d.).

Sebagai Negara yang cenderung menghindari konflik dengan negara-negara dunia terutama yang dapat mengancam keamanan negaranya yang merupakan salah satu fokus utama politik luar negerinya dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Tiongkok akan mengambil tindakan apapun untuk melindungi kepentingan keamanan negaranya tersebut, dalam hal ini Ekonomi bagi Tiongkok merupakan instrumen yang paling menguntungkan dan aman untuk digunakan dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Karena permasalahan keamanan merupakan hal yang sangat penting bagi Tiongkok, Tiongkok lebih mengutamakan mengambil tindakan yang cenderung tidak menggunakan hard power dengan menjalankan prinsip-prinsip non-intervensi dan non-konfrontasi. Prinsip non-intervensi dan non-konfrontasi Tiongkok ini diwujudkan melalui terminologi “peaceful rise”, yang kemudian dijadikan salah satu bentuk politik luar negeri Tiongkok, yang mana Pemerintah Tiongkok menyatakan negaranya tidak akan menjadi ancaman bagi Negara lain. Bentuk politik luar negeri Tiongkok dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan cenderung menghindari konfrontasi tersebut menunjukkan strategi Tiongkok dalam meraih dua hal sekaligus, yaitu memenuhi kepentingan nasional melalui pertumbuhan ekonomi domestiknya, serta penciptaan status sebagai “great power” yang cinta damai dan tidak hegemon di sistem internasional (Zakaria, 2008).

Dengan adanya prinsip tersebut, Tiongkok jarang sekali menggunakan instrumen militernya dalam sengketa antar Negara. Bagi Tiongkok, militer lebih baik digunakan sebagai langkah defensif ketimbang offensif, sebagaimana dalam kepentingan keamanan negaranya bahwa militer merupakan instrumen untuk mempertahankan kedaulatan nasional, integrasi teritorialnya, serta mencegah musuh yang dapat mengganggu kepentingan nasional Tiongkok namun tidak secara langsung digunakan untuk menyerang karena bagi Tiongkok hanya akan memanas suasana konflik bahkan menciptakan perang yang tidak diinginkan. Sehingga Tiongkok fokus untuk terus mengembangkan militernya demi kepentingan keamanan Negaranya ketimbang menggunakannya sebagai senjata untuk membalas Negara yang berkonflik dengannya (Yuliantono, 2009).

Sama halnya dengan Isu THAAD Korea Selatan, alasan utama Tiongkok menentang penempatan sistem pertahanan rudal tersebut didalam wilayah Negara Korea Selatan adalah kemampuan radar yang dimiliki THAAD dapat mengancam kepentingan keamanan Negara Tiongkok yang merupakan salah satu kepentingan nasional utama Tiongkok dalam politik luar negerinya. Radar THAAD diketahui dapat menjangkau sebagian besar wilayah Tiongkok yang ditakuti Tiongkok dapat digunakan sebagai alat untuk memata-matai dan memantau wilayah Tiongkok terutama aktivitas militer milik Negara.

Gambar 1: Jangkauan Radar THAAD

Sumber: <http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/SOUTHKOREA-THAAD/0100403L07J/index.html>

Pada awalnya, pihak Tiongkok telah mengutarakan segala bentuk protes secara langsung terhadap pemerintah Korea Selatan terkait keputusan Korea Selatan untuk menggunakan sistem THAAD milik Amerika Serikat tersebut, namun Tiongkok menyadari sebatas protes yang di tunjukan tidak memberikan perubahan terhadap keputusan Korea Selatan akan THAAD. Tiongkok pada dasarnya telah menahan untuk diri untuk melakukan tindakan yang dapat memperpanjang konflik antara dua Negara, namun penempatan sistem THAAD yang

terus beroperasi di tengah-tengah protes yang dilakukan Tiongkok menjadikan hal tersebut provokasi Korea Selatan untuk Tiongkok. Pemerintah Tiongkok pun, akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan untuk membalas Korea Selatan, yang mana dengan memberikan penekanan terhadap Negara tersebut. Penekanan dilakukan oleh pihak Tiongkok sebagai bentuk strateginya agar dapat memberi dampak yang merugikan Korea Selatan karena telah mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengancam kepentingan keamanan Tiongkok. Dengan kerugian yang dirasakan oleh Korea Selatan, pihak Tiongkok berharap dapat mendorong pemerintah Korea Selatan untuk memikirkan kembali keputusannya tersebut, juga berharap agar penempatan sistem THAAD dalam Negaranya dapat dibatalkan. Melihat kemampuan yang dimiliki Negaranya, pemerintah Tiongkok dipertimbangkan antara dua instrumen untuk strateginya, yaitu strategi penggunaan kekuatan militer dan penggunaan kekuatan ekonominya (Roy, 1998).

THAAD yang berhubungan dengan eksekusi kekuatan rudal balistik, membawa Tiongkok untuk melihat potensi apabila militer yang digunakan dalam strateginya. Tiongkok tumbuh menjadi negara yang sangat fokus dalam mengembangkan kekuatan militernya, sehingga terbukti kemajuan dan kemampuan teknis militer Tiongkok tiga kali lebih hebat bila dibandingkan dengan Korea Selatan. Sehingga bukan tidak mungkin bagi Tiongkok untuk membalas Korea Selatan menggunakan militer. Selain militer, pemerintah Tiongkok juga mempertimbangkan apabila kekuatan ekonomi yang digunakan dalam strateginya. Diketahui bahwa, Tiongkok merupakan mitra perdagangan terbesar bagi Korea Selatan dalam beberapa tahun ini (Tselichtchev, 2017). Demikian, Tiongkok sebagai yang mitra perdagangan terbesar Korea Selatan membuat Korea Selatan memiliki ketergantungan dalam hal ekonomi dengan Tiongkok, sehingga membuat Tiongkok mampu menggunakannya sebagai senjata dalam strateginya untuk menekan Korea Selatan. Demi mencapai tujuan secara maksimal, pemerintah Tiongkok kemudian mempertimbangkan antara kedua instrumen tersebut yang memberikan lebih banyak keuntungan untuk Negaranya dan meminimalkan dampak bagi Negara namun secara bersamaan mampu memberi penekanan terhadap Korea Selatan untuk membatalkan keputusannya akan kebijakan THAAD.

Pemerintahan Tiongkok telah mengatakan bahwa Militer Tiongkok mampu menghancurkan sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) atau membuatnya "buta," begitu sistem milik Amerika Serikat tersebut dikerahkan di Korea Selatan. Menghancurkan THAAD akan sangat mudah bila melihat kemampuan militer, terlebih kekuatan rudal balistik yang dimiliki Tiongkok. Sebagaimana yang dikatakan oleh Peng Guangqian, ahli strategi militer di Tentara Pembebasan Rakyat atau People's Liberation

Army (PLA) Akademi Ilmu Militer bahwa, menghancurkan sistem THAAD dapat dilakukan sepenuhnya oleh Tiongkok. Tiongkok bisa dengan mudah menghancurkannya dengan rudal balistik miliknya, atau juga dapat membuat THAAD tidak berguna melalui gangguan elektronik yang dapat mengganggu fungsi sistem THAAD. Namun, Song Zhongping, seorang pakar militer yang biasa bertugas di Korps Artileri menambahkan bahwa, walaupun dengan melawan THAAD dengan kekuatan rudal sendiri menunjukkan ke Korea Selatan keseriusan dan kredibilitas Tiongkok akan isu ini, namun itu merupakan sebuah pilihan yang akan menimbulkan lebih banyak kerusakan atau bahkan membawa ancaman lebih terhadap keamanan Tiongkok apabila Tiongkok mengambil keputusan untuk menghancurkan sistem radar THAAD. Jadi ini merupakan 'tindakan keras,' yang secara langsung melibatkan serangan (Sheng, Global Times News, 2017).

Adanya tindakan keras akibat aksi Militer yang dilakukan, pemerintah Tiongkok kemudian mempertimbangkan adanya potensi Korea Selatan untuk membalas Tiongkok secara langsung yang kemudian dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perang senjata antar kedua Negara. Dalam iklim globalisasi, perang akan menciptakan bencana yang lebih besar ketimbang memperbaiki tatanan yang ada dan menimbulkan ketidakstabilan dunia internasional yang mana konflik akan aksi militer mengorbankan jiwa serta memancing kemarahan negara lain karena penderitaan manusia yang disebabkan oleh kekerasan. Tentu Tiongkok tidak ingin hal tersebut terjadi, adu militer juga dapat mengancam keamanan Negara Tiongkok sendiri, yang mana keamanan merupakan kepentingan nasional utama Tiongkok yang juga menjadi salah satu alasan kuat Tiongkok tidak ingin adanya THAAD di Korea Selatan. Terlebih lagi apabila Tiongkok menghancurkan THAAD dengan kekuatan militernya malah akan mengekspos kemampuan militernya lebih banyak kepada Amerika Serikat. Yang mana itu pada dasarnya merupakan alasan utama yang membuat Tiongkok menentangkan keberadaan sistem THAAD milik Amerika Serikat di Korea Selatan. Tentu dengan begitu menggunakan kekuatan militer malah akan membawakan kerugian lebih banyak yang harus ditanggung oleh Negara (Sheng, 2017).

Selain itu, menggunakan aksi militer juga berpotensi untuk merusak reputasi global Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memegang posisi yang konsisten dan jelas dalam masalah penggunaan rudal, yang mana Tiongkok selalu menghindari penggunaan hard power terlebih lagi menggunakan kekuatan nuklir karena hanya akan merusak kepentingan keamanan Negara. Demikian, Pemerintah Tiongkok juga sejak dulu hanya menggunakannya instrumen tersebut untuk tindakan defensif. Tiongkok juga memiliki kebijakan nuklir “no first use”,

bahwa tidak akan menjadi yang pertama meluncurkan senjata nuklir melawan musuh nuklir lainnya (Buckley, 2017).

Dalam politik luar negerinya Tiongkok juga terus menyerukan bahwa semua negara harus mengusahakan keamanan yang kooperatif, Sebagaimana juga yang dikatakan oleh juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Hong Lei, bahwa setiap negara harus mengingat kepentingan keamanan negara lain dan perdamaian serta stabilitas regional sambil mengejar kepentingan keamanannya sendiri (Tiongkok's Ministry of Foreign Affairs, 2015). Apabila Tiongkok menggunakan kekuatan militer, itu malah akan bertolak belakang dari prinsip politik luar negerinya selama ini dan akan membawa dampak terhadap reputasi global yang dibangun Tiongkok selama ini, sebagai Negara yang mengedepankan kedamaian.

Sehingga menggunakan instrumen militer bukanlah pilihan yang tepat bagi Tiongkok, terlebih lagi pemerintah Tiongkok mengetahui bahwa pihak Korea Selatan sendiri sepenuhnya menyadari kemampuan militer yang dimiliki Tiongkok, jadi tidak perlu bagi Tiongkok untuk melakukan tindakan atau gerakan militer ekstra yang malah berpotensi membahayakan kepentingan keamanan Tiongkok ketimbang memenuhi tujuannya.

Beda halnya dengan keuntungan dan kerugian yang diterima jika Tiongkok menggunakan sanksi ekonomi sebagai strateginya. Dalam kerugian yang diberikan, walau sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan dapat memberi dampak terhadap perdagangan Tiongkok itu sendiri, namun Tiongkok memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merupakan rekan perdagangan terbesar Korea Selatan alhasil dampak yang diberikan oleh sanksi ekonomi akan lebih dirasakan oleh Korea Selatan. Perekonomian Tiongkok yang diatas Korea Selatan, menjadikan kerugian yang diterima Tiongkok tidak akan seimbang dengan Negara yang perekonomiannya dibawahnya sehingga sedikit kerugian bagi Tiongkok bukanlah hal besar, asalkan Korea Selatan lebih banyak menerima kerugian tersebut. Menurut data dari World Trade Organization atau WTO, rincian total ekspor ekonomi Korea Selatan menunjukkan bahwa Tiongkok menguasai 26,1% dari ekspor Korea Selatan. Dengan impor ke Korea Selatan, Tiongkok juga nomor satu di 16,1%. Sebaliknya, ketergantungan Tiongkok pada ekspor dari Korea Selatan telah menurun sejak 2014, data tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok tidak tergantung pada Korea Selatan karena perekonomian Tiongkok lebih besar dibanding Korea Selatan (Denney, 2015).

Sehingga menggunakan sanksi ekonomi sebagai senjatanya tidak akan menyakiti perekonomian Tiongkok lebih dari Korea Selatan. Dalam iklim globalisasi, adanya ketergantungan ekonomi memberikan keuntungan bagi pelaksanaan sanksi ekonomi, semakin tergantung suatu Negara dengan Negara lain maka akan semakin rapuh Negara tersebut.

Sanksi Ekonomi juga merupakan tindakan yang lebih aman untuk diambil pemerintah Tiongkok, yang mana menjamin keamanan Negara dan warganya serta melindungi keamanan militer Tiongkok. Sanksi ekonomi sesuai dengan definisinya merupakan instrumen Negara yang dianggap sebagai strategi moderat, yang mana dilakukan Negara untuk membuat Negara target berkompromosi dengan hendak Negaranya namun tidak melibatkan kekerasan atau kekuatan militer sehingga aman untuk digunakan dan tidak berpotensi mengancam keamanan Negaranya. Sebagai instrumen politik luar negeri yang aman digunakan, sanksi ekonomi diperkirakan oleh pemerintah Tiongkok dapat menekan Korea Selatan untuk tunduk dengan kepentingan Tiongkok terkait THAAD tanpa memberikan dampak yang mengancam kepentingan keamanan Negaranya. Demikian, Pemerintah Tiongkok pun akhirnya memilih strategi penggunaan kekuatan ekonomi yang dinilai lebih minim dampaknya terhadap Tiongkok (Rosyidin, 2016).

CONCLUSION

Kebijakan Korea Selatan untuk menempatkan sistem pertahanan rudal THAAD milik dalam wilayah Negaranya sebagai tindakan yang diperkirakan dapat melindungi keamanan Negaranya dari ancaman kemampuan rudal balistik Korea Utara tersebut mendapat sikap kontra dari pihak Tiongkok. Sikap tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara Tiongkok dengan Korea Selatan, yang mana Tiongkok ingin Korea Selatan untuk membatalkan kebijakan THAAD tersebut, namun pihak Korea Selatan tetap teguh dengan kebijakannya. Alasan utama, Tiongkok kontra dengan kebijakan THAAD Korea Selatan dan Ingin pihak Korea Selatan untuk membatalkan operasi penempatan sistem THAAD dalam Negaranya adalah kemampuan radar milik THAAD yang menjangkau sebagian besar wilayah Tiongkok dan mengancam kepentingan keamanan Negaranya.

Merasa kepentingan keamanannya terancam, pemerintah Tiongkok pun mengancam akan melakukan tindakan sesuai untuk membalas Korea Selatan yang dapat menghancurkan hubungan baik kedua Negara apabila pihak Korea Selatan tidak segera membatalkan operasi penempatan sistem THAAD tersebut. Akan tetapi, Korea Selatan tetap melanjutkan operasi penempatan sistem THAAD dalam wilayahnya yang kemudian mendorong Tiongkok untuk mengeluarkan strategi dengan tujuan untuk menekan Korea Selatan agar Negara tersebut tunduk dengan keinginan Tiongkok. Strategi yang digunakan Tiongkok adalah dengan memberi sanksi ekonomi terhadap industri perekonomian Korea Selatan. Demikian alasan utama mengapa pemerintah Tiongkok memilih menggunakan

sanksi ekonomi sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingannya terkait kebijakan sistem THAAD Korea Selatan adalah, karena sanksi ekonomi sendiri merupakan strategi yang digunakan sebagai tekanan untuk mempengaruhi Negara target agar mengubah kebijakannya tanpa melibatkan kekerasan. Prinsip politik luar negeri Tiongkok adalah kedamaian dengan demikian kekerasan sesuai prinsip Tiongkok hanya akan menciptakan bencana yang lebih besar ketimbang mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal, sehingga dalam iklim globalisasi sekarang Tiongkok cenderung menggunakan kekuatan ekonomi sebagai instrumen politik luar negerinya untuk memenuhi tujuannya.

Dalam isu THAAD Korea Selatan, pemerintah Tiongkok telah membuat pertimbangan dengan hasil bahwa sanksi ekonomi merupakan instrumen politik luar negeri yang lebih aman untuk kepentingan nasionalnya ketimbang menggunakan instrumen militer yang lebih banyak memberi kerugian apabila digunakan untuk menekan Korea Selatan terkait kebijakan THAAD tersebut. Pemerintah Tiongkok telah mengatakan bahwa, kekuatan militer Tiongkok mampu dengan mudah menghancurkan sistem THAAD tersebut, namun hal tersebut malah akan membawa ancaman terhadap keamanan Tiongkok karena dengan menghancurkan THAAD berarti berhubungan dengan Tiongkok menggunakan rudal balistiknya sendiri untuk menyerang, eksekusi kekuatan rudal balistiknya dalam serangan THAAD akan mengekspos kemampuan militernya terhadap Amerika Serikat yang merupakan kekhawatiran utama Tiongkok terkait adanya sistem THAAD milik Amerika Serikat di Korea Selatan. Pemerintah Tiongkok tentu akan menghindari ancaman tersebut dan fokus untuk melindungi keamanannya, sehingga kemudian memilih sanksi ekonomi sebagai strateginya.

REFERENCES

Books

Allison, G. T. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Brown and Company.

Amstutz, M. R. (1998). *International Conflict and Cooperation: an introduction to world politics*. New York: McGraw-Hil.

Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Methods*. New York: Palgrave MacMillan.

Harrell, P. (2018). *China's Use of Coercive Economic Measures*. Washington: Center for a New American Security.

Jack C. Plano, R. O. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Jakarta: Putra A. Bardin.

Kegley, C. W. (2011). *World Politics: Trend and Transformation*. Boston: Wadsworth Publishing.

Rosenau, J. (1976). *World Politics: an introduction*. New York: The Free Press.

Rosyidin, M. (2016). *Sanksi Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Roy, D. (1998). *China's Foreign Relations*. Lanham, MD, United States: Rowman & Littlefield.

Zakaria, F. (2008). *The Post-American World*. W. W. Norton & Company: New York.

Journal Articles

Habiburrahman. (2017). Penentangan Tiongkok terhadap Korea Selatan Dalam Pengadaan Terminal High Altitude Area Defense. *Jom Fisip*, 11.

Hutchinson, G. A. (2016). China's Uneven Response to THAAD and its Coercive Strategy Aimed at the ROK: Implications for the U.S.-ROK Alliance. *International Journal of Korean Studies*, 19-20.

Liang Fook, J. C. (2017). China-South Korea Relations: Terminal High Altitude Area Defence System Deployment and Implications for Bilateral Ties. *East Asian Policy*, ii.

Muchtar, A. (2011). Kebangkitan dan Kebijakan Luar Negeri Cina: Antara Presepsi dan Pilihan. *Jurnal MAARIF*, 32.

Yulianto, B. A. (2009). Strategi Militer China Dalam Menghadapi Aliansi AS Dengan Negara Sekutunya di Asia Timur. *FISI UI*, 2.

Article in Newspaper

Chris Inton, J. W. (2017, May 2). THAAD Missile Defense System. Reuters. Retrieved from <https://www.reuters.com/http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/SOUTHKOREA-THAAD/0100403L07J/index.html>

Denney, S. (2015, September 4). South Korea's Economic Dependence on China. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2015/09/south-koreas-economic-dependence-on-china/>

Lee, B. (2017, Oktober 7). THAAD and the Sino-South Korean Strategic Dilemma. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2016/10/thaad-and-the-sino-south-korean-strategic-dilemma/>

Marcus, J. (2018, Februari 13). The 'Globalisation' of China's military power. *BBC News*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-43036302>

McGuire, K. (2018, Februari 27). China-South Korea Relations: A Delicate Détente. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2018/02/china-south-korea-relations-a-delicate-detente/>

Peck, M. (2018, Agustus 21). 7 Signs that China's Military is Becoming More Dangerous. The National Interest. Retrieved from <https://nationalinterest.org>: <https://nationalinterest.org/blog/buzz/7-signs-chinas-military-becoming-more-dangerous-29352>

Setiawan, A. (2017, Agustus 3). Cina Mulai Menggunakan “Sanksi Ekonomi” Sebagai Senjata Politik. Nusantara News. Retrieved from <https://nusantaranews.co/>: <https://nusantaranews.co/cina-mulai-menggunakan-sanksi-ekonomi-sebagai-senjata-politik/>

Sheng, Y. (2017, Maret 1). Military analysts suggest ways to disable THAAD. Global Times. Retrieved from <http://www.globaltimes.cn/index.html>: <http://www.globaltimes.cn/content/1035343.shtml>

Tiezzi, S. (2016, February 26). China Warns THAAD Deployment Could Destroy South Korea Ties 'in an Instant'. The Diplomat. Retrieved from <https://thediplomat.com>: <https://thediplomat.com/2016/02/china-warns-thaad-deployment-could-destroy-south-korea-ties-in-an-instant/>

Tselichtchev, I. (2017, Oktober 8). Beyond THAAD: the real reason why China is angry with South Korea. This Week In Asia News. Retrieved from <https://www.scmp.com/week-asia>: <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2114232/beyond-thaad-real-reason-why-china-angry-south-korea>

Volodzko, D. J. (2017, November 18). China wins its war against South Korea’s US THAAD missile shield – without firing a shot. This Week in Asia. Retrieved from <https://www.scmp.com/week-asia>: <https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2120452/china-wins-its-war-against-south-koreas-us-thaad-missile>

Internet

Pike, J. (n.d.). China Military. Global Security. Retrieved from [globalsecurity.org](http://www.globalsecurity.org): <https://www.globalsecurity.org/military/world/china/forrel.htm>